

Kemenparekraf Ajak Mantan Napiter Jadi Pelaku Bisnis Wisata

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Malang - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengajak puluhan pelaku wisata dan mantan narapidana terorisme (napiter) untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata.

Mereka ikut dalam bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Malang, Sabtu, 25 Maret 2023. Setidaknya ada sebanyak 60 peserta yang terdiri dari 20 mantan napi kasus terorisme dan para pelaku wisata yang tersebar di wilayah Malang.

Kemenparekraf dan BNPT ingin membangun pola pikir masyarakat agar bisa berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di daerahnya termasuk para mantan Napiter agar tidak terjerumus pada radikalisme.

“Kabupaten Malang adalah salah satu pintu masuk menuju Destinasi [Pariwisata](#) Prioritas Bromo Tengger Semeru. Daerah ini banyak dikunjungi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Sehingga perlu diciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Agar tingkat kunjungan wisatawan,

semakin meningkat,” kata Analis

Kebijakan Ahli Madya Kemenparekraf, Surana. Kemenparekraf saat ini terus melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan meluncurkan berbagai program. Mulai dari sosialisasi, pelatihan hingga pendampingan. Termasuk melakukan kampanye sadar wisata.

Program itu menysasar di lima destinasi super prioritas. Yang meliputi Danau Toba, Borobudur Yogyakarta Prambanan, Mandalika, Wakatobi dan Labuan Bajo. Termasuk destinasi wisata prioritas Bromo Tengger Semeru.

“Program ini, menysasar kepada masyarakat untuk membangun pola pikir, dan menjadi pemeran aktif dalam mengembangkan [kepariwisataan](#) di daerahnya. Keberhasilan program pengembangan pariwisata daerah akan sangat memerlukan peran aktif terutama dari masyarakat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Baik akademisi, pemda maupun unsur masyarakat lainnya,” ujar Surana.

Sementara itu, dalam upaya penanggulangan terorisme sendiri, BNPT-RI juga membentuk Kegiatan Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme tahun 2023. Dimana hal itu mengacu pada Peraturan Kemenko Polhukam nomor 22 tahun 2022.

Plt Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas BNPT-RI, Kombes Pol Astuti Idris mengatakan kegiatan itu difokuskan pada 5 provinsi, 4 kota dan kabupaten se Indonesia. Di Jawa Timur sendiri ada 6 daerah. Yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Probolinggi, Magetan dan Kabupaten Malang.

“Dalam hal ini ada sejumlah sasaran. Baik individu maupun kelompok. Untuk individu seperti napiter, mantan napiter, korban, keluarga napiter atau mantan napiter dan korban. Tokoh radikal, jaringan radikal, tokoh masyarakat dan masyarakat rentan terpapar,” tutur Astuti.